

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

- 1) Tingkat kemandirian keuangan daerah Kota Kupang selama periode 2014 – 2023 tergolong masi rendah sekali selama 10 tahun, dengan presetase berkisar antara 10,69% - 19,82% yang masih berada kategori rendah sekali. Kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) tidak berubah terhadap total pendapatan daerah. Kondisi ini mengindikasikan bahwa Pemerintah Kota Kupang belum mampu membiayai secara optimal penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik dengan mengandalkan sumber pendapatan daerah sendiri.
- 2) Rasio ketergantungan keuangan daerah Kota Kupang terhadap pendapatan transfer dari pemerintah pusat masih tergolong tinggi, hingga sangat tinggi. Ditahun 2014 – 2015 dengan presentase 68,62% dan ditahun 2017 – 2023 dengan presetase 74,08% - 82,50% kategori sangat tinggi, sehingga peran dana transfer sangat dominan selama 10 tahun, kondisi ini mengindikasikan bahwa kemandirian keuangan daerah kota kupang selama periode tersebut masih buruk karena dari hasil analisis menunjukan bahwa peran pemerintah pusat sangat dominan dalam pengelolaan keuangan daerah kota kupang. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah Kota Kupang masih sangat bergantung pada pemerintah pusat, sehingga diperlukan upaya

strategis dan berkelanjutan untuk meningkatkan PAD guna memperkuat kemandirian keuangan daerah di masa mendatang.

5.2. Implikasi Teroritis

Di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian terdahulu sebagai perbandingan dan tolak ukur serta mempermudah peneliti dalam menyusun penelitian ini.

1. Menurut Lisa Evita Christina Kapoh, Debby Ch. Rotinsulu dan, Mauna Th. B. Maramis (2020) yaitu Pengaruh Kemandirian terhadap Pengelolaan merupakan Kemampuan Pemerintah Kota Manado dalam membiayai sendiri Kegiatan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Maka P-value tersebut signifikan karena 0,02. Hal ini menunjukkan bahwa P-value lebih kecil dari tingkat signifikan (α) = 5% (0.05) artinya kemandirian keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah. Lebih lanjut sebagaimana yang diterangkan oleh Dewi Mahmuda (2019) kemandirian keuangan daerah Pemerintah Kota Baubau melalui Badan Pengelolaan Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah Kota Baubau menunjukkan tingkat kemampuan keuangan daerah sangat masi rendah sekali. Karena tingkat kemandirian di Kota Baubau selama tahun 2015, 2016 dan 2017 adalah masing-masing sebesar 10,79%, 12,69% dan 11,82%. Ketiga nialai berada kategori rendah yaitu antara 0 – 25%. Hal ini berarti bahwa peranan Pemerintah Pusat lebih dominan dari pada kemandirian Pemerintah Daerah.

2. Dalam uraian diatas penulis merumuskan hasil penelitian dengan Judul Analisis Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Dikota Kupang tahun 2014 - 2023. Menunjukan bahwa rata-rata tingkat rasio kemandirian keuangan daerah (pendapatan asli daerah) sebesar 15,25% masuk dalam kategori rendah sekali. Sedangkan dalam merealisasikan pendapatan asli daerah sebesar 98,94% masuk dalam kriteria/kategori tinggi. Akan tetapi pendapatan asli daerah (PAD) Belum mampu membiayai sendiri seluruh kegiatan pemerintahan daerah kota kupang selama periode tersebut.

5.3. Implikasi Terapan

Secara praktis, hasil penelitian ini menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Kota Kupang dalam merumuskan strategi peningkatan kemandirian fiskal daerah. Pemerintah daerah perlu mengoptimalkan sumber-sumber PAD melalui:

1. Peningkatan efektivitas pemungutan pajak dan retribusi daerah, termasuk perbaikan sistem administrasi dan pengawasan.
2. Pengelolaan aset daerah secara produktif, sehingga mampu memberikan kontribusi nyata terhadap PAD.
3. Pengembangan sektor-sektor potensial daerah, seperti pariwisata, perdagangan, dan jasa, sebagai sumber pendapatan baru.

Dengan langkah-langkah tersebut, pemerintah daerah diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada dana transfer pusat dan meningkatkan

kemandirian fiskal secara bertahap. Pada akhirnya, kemandirian keuangan yang lebih baik akan memberikan fleksibilitas bagi pemerintah daerah dalam merencanakan pembangunan sesuai kebutuhan dan potensi lokal.